

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada maret 2020, Indonesia terserang bencana nasional yaitu berupa wabah penyakit yang disebut dengan pandemi COVID-19 (Sulasih, 2020). Adanya Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat dan memberikan banyak sekali dampak negatif di berbagai sektor khususnya perekonomian di Indonesia. Permasalahan ini mendesak pemerintah tidak hanya melakukan langkah antisipasi untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 melainkan memulihkan perekonomian di Indonesia (Silviani et al., 2020). Konteks di Indonesia, serangkaian kebijakan telah diterapkan sebagai langkah antisipasi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 seperti salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi interaksi sosial masyarakat diluar rumah. Meski demikian, pasca pandemi COVID-19, kebijakan PSBB dinilai menjadi salah satu faktor yang membawa dampak negatif terhadap sektor perekonomian di Indonesia (Thorik, 2020).

Hal ini dikarenakan meskipun PSBB bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, faktanya justru penerapan PSBB menjadi *paradoks* terhadap sektor perekonomian seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) (Mali, 2021). Data yang diperoleh dari hasil survey Bank Indonesia (BI) menyebutkan sebanyak 87.5 % UMKM di Indonesia terdampak dari penerapan kebijakan PSBB. Dampak paling parah dirasakan UKM yang berada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan interaksi sosial

masyarakat seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Jogja Economic Resilience for Covid-19 (Jercovid) menyebutkan bahwa pasca diterapkannya kebijakan PSBB sebanyak 80% UKM di DIY mengalami penurunan pendapatan (Evani, 2020). Dampak penurunan pendapatan terparah dialami oleh pelaku UKM yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti di Kabupaten Sleman yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 59% (Evani, 2020). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel omzet UKM di Kabupaten Sleman tahun 2019-2021 dibawah ini:

**Tabel 1. Data Pendapatan UKM Kabupaten Sleman 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah UKM	Omzet
1	2019	41.852	Rp.6.097.463.397.249
2	2020	68.382	Rp 4.274.801.639.970
3	2021	89.871	Rp. 2.985.244.365.752

Sumber. Diperoleh dari Satu Portal Data

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2021 UMKM di Kabupaten Sleman selalu mengalami penurunan omzet. Puncaknya di tahun 2021 yang hanya mendapatkan omzet sebesar Rp. 2.985.244.365.752 dari total 89.871 UMKM di Kabupaten Sleman. Selain itu, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman meningkat secara signifikan selama masa pandemic covid-19. Seperti pada gambaran table diatas, pada 2019 lalu jumlah UMKM yakni sebanyak 41ribu unit usaha. Kemudian bertambah menjadi 68ribu unit usaha hingga desember 2020. Jumlah ini terus bertambah hingga 80ribu unit usaha hingga mei 2021.

Adapun secara kuantitas, jumlah itu 56% diantaranya atau sekitar 45 ribu unit usaha bergerak di bidang pangan atau usaha kuliner. inilah sektor yang menurutnya bertahan di masa pandemic sehingga banyak dari mereka yang beralih ke sektor kuliner setelah usaha sebelumnya dirasa mengalami penurunan. Pertumbuhan jumlah unit usaha ini juga dipicu oleh banyaknya pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK. Mereka kemudian mencoba merintis usaha yang sebagian besar memilih sektor pangan (Sinuraya et al., 2018). Maka dari itu berbagai macam hal terjadi pada saat pandemi covid-19 sehingga meningkatkan jumlah UMKM di Kabupaten Sleman.

Permasalahan ini dikarenakan sebagian besar metode pemasaran UMKM di Kabupaten Sleman masih bersifat konvensional atau melakukan transaksi secara langsung. Sehingga adanya penerapan PSBB di Kabupaten Sleman membawa dampak negatif terhadap pemasaran produk UKM (Sinuraya et al., 2018). Permasalahan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk mengeluarkan serangkaian kebijakan dengan tujuan untuk memulihkan kembali sektor perekonomian khususnya untuk pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

Serangkaian kebijakan yang dilakukan salah satunya adalah memberdayakan pelaku UKM di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha untuk pelaku UMKM. Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memfokuskan delapan program penumbuhan iklim usaha UKM, diantaranya: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan (Lestari et al., 2021). Meski demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk

mengetahui proses implementasi serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Sleman.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman pasca pandemi covid-19 oleh Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan menganalisis program pemberdayaan UKM dengan memperhatikan delapan aspek pemulihan ekonomi. Pelaksanaan delapan program tersebut akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan untuk mengetahui keberhasilan program pemberdayaan UKM dengan menganalisis tiga indikator (Korten, 1980), yaitu: Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat; kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana; ketiga, kesesuaian antara kelompok manfaat dengan organisasi pelaksana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman pasca pandemic covid-19.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman pasca pandemic covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam kepenulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu referensi ilmu pemahaman baru khususnya bagi prodi ilmu pemerintahan untuk mengetahui berbagai bentuk langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah kabupaten sleman dalam pemberdayaan UMKM pasca pandemi COVID-19.

### **2. Manfaat Praktik**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan banyak manfaat khususnya bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman itu sendiri berupa sumber wawasan dan pengalaman baru dalam menghadapi tantangan besar berupa wabah pandemi Covid-19 serta mempersiapkan berbagai macam upaya strategis terkait penguatan UMKM yang tepat sasaran oleh Kabupaten Sleman.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi Covid-19 merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yakni:

**Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Klasifikasi Tema	Hasil Penelitian
1	(Sutaryono, 2022)	Pemberdayaan Dinkop UKM terkait strategi	Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan Dinkop & UKM

		pemasaran yang tepat berbasis digital	terkait strategi pemasaran yang tepat berbasis digital dengan tujuan memberikan dampak bagi perkembangan usaha dalam memulihkan perekonomian Pasca COVID-19.
2	(Erwinsyah et al., 2020)	Efektifitas hasil pemberdayaan UMKM berbasis digital	Hasil penelitian menunjukan kolaborasi Dinkop & UKM dengan sektor perguruan tinggi dalam melaksanakan program pemberdayaan dalam membranding dan promosi pemasaran produk berbasis digital dengan tujuan memperluas pangsa pasar dari lokal ke tingkat nasional hingga internasional.
3	(Hapsari & Kinseng, 2018)	Partisipasi dalam program pemberdayaan UMKM dengan kesejahteraan peserta	Hasil penelitian menjelaskan program pemberdayaan UMKM tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi dalam

			program pemberdayaan UMKM yang diadakan oleh Dinkop.
4	(Utami, 2018)	Pengaruh bantuan modal, pelatihan dan pendampingan UMKM	Hasil penelitian menjelaskan kegiatan pemberdayaan terdapat pengaruh positif bantuan, pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan terhadap UMKM.
5	(Yusa et al., 2018)	Pemberdayaan ekonomi kreatif desa wisata untuk peningkatan pendapatan UMKM.	Hasil penelitian menjelaskan program pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan pemahaman ekonomi kreatif desa dengan tujuan membangun perekonomian desa melalui UMKM.
6	(Kusumaningrum, 2016)	Pemberdayaan perempuan UMKM dalam kebangkitan ekonomi lokal	Hasil penelitian menjelaskan keterlibatan perempuan dalam UMKM dengan melaksanakan pemberdayaan seperti pembinaan dan studi banding untuk mengopimalisasi

			pengolahan dan pemasaran UMKM lokal.
7	(Sinuraya et al., 2018)	Pendekatan kebijakan adaptif dalam penguatan modal UMKM di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menjelaskan kebijakan pengenaan bunga berpengaruh pada minat UMKM yang sebetulnya mampu mengakses dengan pinjaman dana besar.
8	(Ardiyati & Zuhdan, 2018)	Pemberdayaan UMKM dalam manajemen jaringan usaha	Hasil penelitian menjelaskan pemberdayaan yang menitikfokuskan manajemen jaringan usaha belum sepenuhnya terlaksana karena faktor pengetahuan pelaku UMKM yang masih rendah.
9	(Khan et al., 2022)	Pemberdayaan digital marketing UMKM	Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan digital marketing UMKM dilakukan dengan lima strategi, diantaranya: kemasan harus menarik, mutu produk, market place, digital branding, dan label halal.



10	(Akmal Latif, 2022)	E-Government dalam membangkitkan UMKM di DIY	Hasil penelitian menjelaskan peranan E-Government dapat memasarkan produk UMKM secara digital. Program gratis ongkir menjadi magnet bagi pembeli melarisi atau berbelanja.
11	(Arianto, 2019)	Branding produk UMKM di DIY	Hasil penelitian menunjukkan UMKM perlu bersinergi dengan sejumlah stakholder termasuk buzzer media sosial. Hal ini dapat menjadi salah satu alternatif branding produk UMKM.
12	(Prasetyo & Hasyim, 2022)	Kelembagaan dan potensi lokal dalam mendukung UMKM DIY	Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan UMKM terbentuk dari masyarakat yang diberdayakan, dikembangkan pengetahuan. Budaya dan teknologi dan sumberdaya lokal, memanfaatkan sumberdaya

			yang melibatkan berbagai sektor.
13	(Kharisman & Atmojo, 2021)	Responsivitas Dinkop UMKM dalam menangani	Hasil penelitian menunjukkan Dindikop cukup responsif dalam menanganai UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, terutama pada aspek sikap dan pembutan kebijakan yang mengacu keluhan UMKM.
14	(Hanif & Atmojo, 2022)	Pelatihan digital marketing dalam pemberdayaan UMKM	Hasil penelitian menunjukan penyelenggaraan pelatihan digital marketing berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian dalam dimensi product, pelatihan digital marketing diselenggarakan oleh Dinkop & UKM belum efektif.
15	(Faidati & Khozin, 2020)	Pemberdayaan UMKM yang berdaya saing	Hasil penelitian menunjukan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan dalam tiga tahapan, yakni: penyamaan visi